

Analisis Linguistik Pancasila Berdasarkan Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi

Oleh

Supriyo Wira Ramdhani

piyu_dhani@yahoo.com

Abstrak

Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia, dan sudah melampaui proses tahan uji yang panjang, sehingga bangsa kita tidak mudah terpecah belah, seperti negara-negara yang lain. Pancasila, yang sudah menjadi simbol di lambang burung Garuda Indonesia, bisa menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan fondasi Pancasila. Kenapa? Sebab, ibarat rumah yang kokoh dan kuat, Pancasila adalah pancang besi tiang yang menancap dalam ke bawah tanah, sehingga setiap batu bata yang disemen dengan campuran pasir halus akan kokoh, ditambah atap rumah nantinya, dan rumah akan menjadi tahan lama terhadap panasnya matahari dan siraman hujan yang deras. Begitu pula seperti itu peran Pancasila. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa keruntuhan negara-negara yang mulai rusak akibat tidak stabilnya dasar negara mereka yang mudah sekali diubah, tanpa pemikiran lebih matang lagi. Sebut saja, Republik Arab Mesir, Suriah, Iraq, Libia, dan negara-negara lainnya, padahal kebanyakan dari mereka terdiri dari satu ras bangsa saja, contohnya bangsa Arab. Namun, hal tersebut tidak bisa meredam ketidakstabilan dan kemelut yang terjadi sewaktu-waktu, padahal peran Negara-lah untuk meredam gejolak panas di dalam negeri, sesuai Dasar Negara yang tercantum di dalamnya.

Disini, penulis berusaha merefleksikan hakekat setiap sila Pancasila, yang sampai sekarang tetap menjadi Dasar Negara kita, dan tahan uji sejak tahun 1945. Dimulai dari epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari setiap sila Pancasila.

Kata Kunci: Linguistik, Pancasila, Nilai

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

“Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa,

Rwaneka datu winuwus wara buda wiswa,

Bhineki rakwa ringapan kena parwa nosen,

Mangkan jinatwa, kalawan siwatatwa tunggal,

Bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa.”

Artinya, “Sumber-sumber ajaran agama konon berbeda-beda, tapi bicara mengenai Sang Kuasa, kapankah Dia dapat dibagi-bagi. Karena baik ajaran siwa-maupun-buda adalah tunggal Berbeda-beda tetapi tetap satu, Dharma tak dapat dibagi-bagi.” (Edwin; 2006:VII)

Pancasila adalah Dasar Negara yang merupakan buah fikir ideal dari para pendiri bangsa ini. Pancasila bukanlah kalimat-kalimat tanpa makna, sehingga hanya sekedar digunakan simbol dan lambang di dada burung Garuda Indonesia. Namun, Pancasila merupakan hasil refleksi dari seluruh hakekat bangsa Indonesia, dan diintisarikan menjadi lima butir dan disingkat di dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saja, melainkan juga difungsikan selaku ideologi ilmu (dan teknologi) bagi kita, atau dalam arti lain, konteks pengembangan ilmu pengetahuan di negeri ini bukanlah ilmu untuk ilmu, tetapi bersifat teknologis; ilmu harus bertujuan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (Sutrisno; 2006:131)

Pancasila merupakan karya bersama para pendiri bangsa ini setelah melewati kurang lebih empat ratus tahun lamanya memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. (Latif; 2011:39-40) Pancasila sebagai ideologi bersendikan nilai-nilai Filsafat Pancasila dalam artian sistem kognitif, sedangkan di lain pihak bersendikan *Weltanschauung* Pancasila dalam artian sistem normatif. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa dalam menempuh perjalanan kenegaraan dan kemasyarakatan. Demikian maka bangsa kita meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. (Sutrisno; 1988:77) Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat, artinya suatu kesatuan yang setiap bagiannya saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu. (Kaelan; 2009:66-68) Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan sumber nilai bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara secara kongkrit.

Sila pertama dimulai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan pengikat untuk tiga sila lainnya, sehingga dua fondasi sila awal ini, adalah sila yang benar-benar mengakar sehingga tidak terjadi perubahan dari zaman ke zaman. Pembahasan di dalam makalah ini adalah mengenai filsafat Pancasila, yang terdiri dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari Pancasila itu sendiri, karena Pancasila merupakan ideologi negara yang benar-benar disusun sesuai kondisi bangsa Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan, dan terbukti dengan adanya Pancasila, negara Indonesia bisa tetap kokoh di dalam satu kedaulatan, Republik Indonesia, meskipun Timor-Timur telah lepas dari kedaulatan NKRI.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pancasila merupakan sistem filsafat atau hanyalah ideologi kosong semata?
2. Kenapa sila pertama keyakinan religius?
3. Bagaimana hierarkis Pancasila piramida bisa disebut sebagai satu kesatuan dan bisa digunakan dari atas ke bawah, sedangkan kita tahu bahwa piramida adalah bentuk yang di bawah menopang (kasta bawah), sedangkan di atas sebagai pucuk inti (pemimpin)?
4. Bagaimana model demokrasi Indonesia?

PEMBAHASAN

Filsafat Bahasa Pancasila

A. Landasan Epistemologis Pancasila

Setiap ideologi pemikiran, hendaklah di dalamnya terdapat Epistemologi, karena tanpa itu, kebenaran ideologi bisa saja terbantahkan dengan pemikiran lainnya, atau bahkan ideologi tersebut tidak memiliki landasan kebenaran yang tepat. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis berusaha mencari Epistemologi dari Pancasila, yakni kebenarannya yang sudah

teruji. Hal tersebut bisa kita lihat dari pendapat Muh. Yamin di dalam buku ‘Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, ia menyebutkan,

“Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistema filsafah...”

“Menurut Hegel, bahwa hakekat filsafatnya ialah suatu sinthese pikiran yang lahir dari pada antithese pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah tepat. Begitu pulalah dengan ajaran Pancasila, satu sinthese negara yang lahir dari pada satu anthithese. Ingatlah kalimat pertama dari pada mukadimah Republik Indonesia yang berbunyi:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat pertama ini iualah kalimat anthithese. Pada ketika anthithese itu sudah hilang maka lahirlah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran filsafat Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam mukadimah Konstitusi 1945 itu dan yang berbunyi:

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesaatuan berdasarkan ajaran Pancasila, di sini disebutkan sila yang kelima untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dunia dan kemerdekaan.

Kalimat ini adalah kalimat sinthese. Tidakkah ini jelas dan nyata menyebutkan satu sinthese pikiran atas anthithese pendapat? Jadi sejajar dengan tinjauan pikiran Hegel, beralasanlah pendapat bahwa ajaran Pancasila itu adalah sistema filsafat, sesuai dengan dialektik Neo Hegelian.” (Sunoto; 1985:47-48)

Lantas bagaimana dengan beberapa orang sekarang yang mengkritik Pancasila tidak sesuai perkembangan zaman, dan malah mereka menyarankan untuk mengubah isi Pancasila, agar

sesuai dengan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia sekarang. Hal tersebut rupanya sudah dijawab oleh Prof. Dr. R.M. Soeripto pada sidang ke-III, rapat Perundingan Konstituante Republik Indonesia mengenai Dasar Negara,

“... Pancasila sebagai Dasar Negara telah dipergunakan selama lebih dari 12 tahun dengan tahan uji. Bilamana Negara kita sekarang mengalami kesulitan-kesulitan kenegaraan, ini disebabkan oleh hal diluar Pancasila. Menurut hemat kami, diantaranya oleh karena kita tidak mentaati Dasar Musyawarah dari Demokrasi Indonesia yaitu dasar keempat dari Pancasila, tetapi memakai sistim demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan kejiwaan kita. Berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia mendukung Pancasila maka satu-satunya Dasar Negara yang dapat dipergunakan terus adalah Pancasila.” (Notonagoro; 1957:98)

Menurut Soekarno di dalam rapat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa dasar negara Indonesia bukanlah Panca Dharma, karena Dharma artinya kewajiban, sedangkan di dalam rapat tersebut dibahas dasar negara. Disinilah Soekarno memberi nama dasar negara Indonesia dengan Pancasila, sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia, negara yang kekal dan abadi. (Sekretariat Negara Republik Indonesia; 1995:81-82) Soekarno melanjutkan mengenai dasar negara yang lima berasal dari; 1. Nasionalisme Indonesia, 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Keadilan Sosial, 5. Ketuhanan. (Edwin; 2006:13)

B. Landasan Ontologis Pancasila

Pancasila memiliki esensi di setiap silanya, yakni:

1. Ketuhanan sebagai esensi sila pertama, hakekat dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena hakekat Tuhan memang sulit untuk diketahui, dan manusia merupakan makhluk paling sempurna secara logika-*pun* sulit mengetahui kesempurnaan Tuhan, namun mereka bisa
-

merasakan dari kekuasaan Tuhan, baik dari penciptaan-Nya maupun dari pengabulan doa-doa manusia, sehingga mereka meyakini adanya Tuhan yang Maha Sempurna dan Maha Kuasa, serta Maha Esa.

Bukti adanya Tuhan secara ontologis adalah bahwa segala sesuatu di dunia tidak berada karena dirinya sendiri, melainkan karena suatu yang disebut ide, dan ide ini berasal di luar, maka ide yang tertinggi adalah Tuhan sebagai kausa prima. (Kaelan; 2009:147).

Jika kita melihat dari hierarki Pancasila, maka kita dapat menemukan bahwa sila pertama merupakan sila yang selalu menjadi persoalan, kenapa? Karena di Indonesia terdiri dari berbagai keyakinan religi maupun agama yang tidak terhitung jumlahnya, oleh karena itu, isi dari sila pertama yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, adalah yang tidak terikat kepada bentuk ketuhanan yang maha esa tertentu, namun tidak memperkosa inti daipada arti dan istilah sila pertama, dengan kata lain perkataan batas-batas daripada inti-isinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan di dalamnya. (Notonagoro; 1957:32) Maka, sila pertama disebut juga sebab yang pertama/ causa prima. Kita bisa melihat sila pertama dari segi lainnya, yakni mengenai ‘manusia’ yang diciptakan oleh penciptanya, maka Tuhan-*lah* jawabannya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan otonom terdiri atas jasmani dan rohani, juga memiliki sifat individu dan sifat sosial. berdasarkan atas sejarah, sebelum datangnya agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan, karena keadaan alam yang sedemikian rupa, maka bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan hidupnya harus dapat mengatasi tantangan alam tersebut, salah satunya dengan pandangan hidup atau kepercayaan bahwa alam ini ada yang menciptakan, dan dari sinilah terbentuk kepercayaan bangsa Indonesia secara sederhana, yakni percaya adanya jiwa-jiwa yang menguasai alam, adanya kekuatan gaib yang terdapat di dalam alam ini dan lain sebagainya. (Sunoto; 1985:2)

2. Kemanusiaan sebagai esensi sila kedua, hakekat dari manusia. Manusia utuh dilihat dari kacamata sila kedua adalah yang sadar akan dirinya sebagai manusia, yaitu yang berkepribadian luhur. Berbeda dengan binatang dengan nilai kejiwaannya, manusia
-

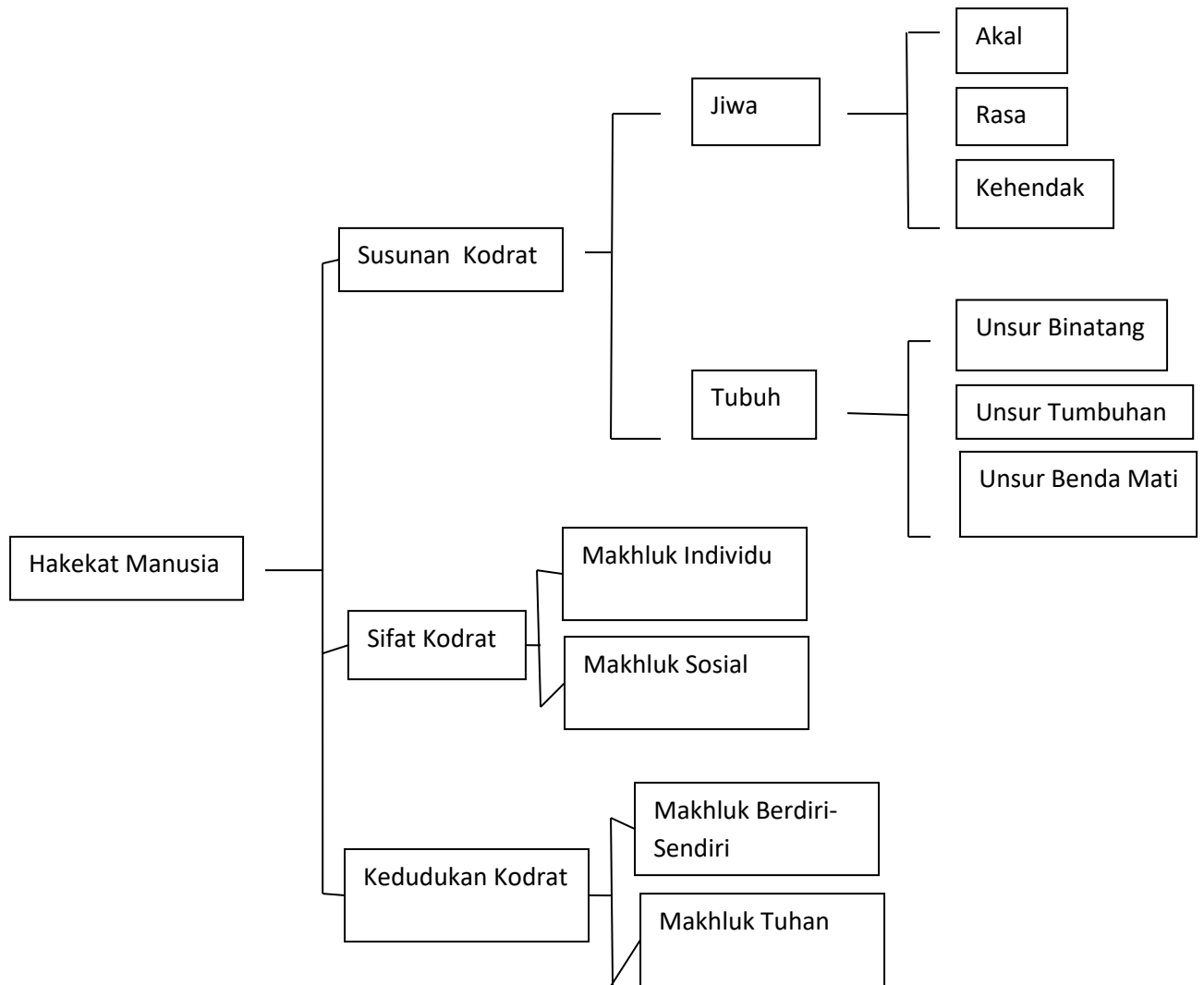
wajib berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.

Manusia sebagai makhluk yang monodualis, bisa diartikan ke berbagai macam, seperti yang Notonagoro abstrakkan di dalam unsur-unsur hakikat manusia;

- a) Susunan kodrat manusia terdiri atas; 1) raga (terdiri dari unsur benda mati, unsur binatang, unsur tumbuhan), 2) jiwa (yang terdiri dari unsur akal, rasa, dan kehendak).
- b) Sifat-sifat kodrat manusia terdiri atas; 1) makhluk individu, dan 2) makhluk sosial.
- c) Kedudukan kodrat manusia terdiri atas; 1) makhluk berdiri sendiri, dan 2) makhluk Tuhan. (Kaelan; 2009:162)

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan keputusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan-kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yang berujud penghati-hati (kebijaksanaan), keadilan, kesederhanaan dan keteguhan, untuk mencapai tujuan hidup manusia, ialah kebahagiaan sempurna. (Notonagoro; 1988:205)

Hakikat dari sila kedua, adalah yakni ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’, sudah tentu berbeda dari sila pertama, karena manusia tidak mungkin bercita-cita menjadi manusia yang kehewan, sehingga pribadi manusia –baik tujuan maupun harapan hidup- selalu tertuju kepada ciri khasnya, yakni manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk individu, maka kemanusiaan dapat dirumuskan sebagai hakikat daripada susunan diri manusia atas tubuh dan jiwa serta sifat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. (Notonagoro; 1957:32-33) Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan-kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yang berujud penghati-hati (kebijaksanaan), keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni kebahagiaan sempurna. Mengenai hakekat manusia, Notonagoro telah melukiskan di dalam gambar di bawah ini: (Sunoto; 1985: 63)



Kekhususan bangsa Indonesia adalah adil dan beradab. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, mempunyai sopan santun, mempunyai susila, artinya ada kesediaan menghormati bangsa lain, menghormati pandangan, pendirian, dan sikap bangsa lain. Bukti-bukti perbuatan adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya membantu meringankan penderitaan orang lain karena bencana alam, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, hubungan dengan luar negeri baik melalui perdagangan maupun politik.

Pembahasan sila pertama dan sila kedua, meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar daripada sila-sila lainnya. Akan tetapi, sila persatuan Indonesia atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia, sebagai

pengkhususan daripada kedua sila yang pertama, dan mengenai hidup bersama di dalam masyarakat dan Negara, meskipun ada sangkut pautnya juga dengan lingkungan-lingkungan hidup yang lain. Lingkungan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial pada pokoknya mengenai lapangan lahir, akan tetapi mengingat susunan piramida Pancasila, juga berdasarkan asas-asas batin. Sila pertama dan kedua adalah pedoman dan tolak ukur untuk tiga sila lainnya, (Notonagoro; 1957:33)

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. (Sunoto; 1985:128) Ada-bersama, yakni ‘berada-bersama-dengan-sesama’ mempunyai prinsip fundamental, yaitu cinta kasih. Jika manusia taat kepada prinsip ini maka hidup bersama merupakan persaudaraan, jadi yang termuat di dalamnya yakni ‘perikemanusiaan’ yang menjunjung tinggi sesama manusia, menghormati setiap manusia. (Sutrisno; 2006:77) Perikemanusiaan adalah konsep umum universal, yang belum merujuk ke suatu bidang khusus kehidupan. Dalam perkembangan hidup manusia yang membuat diferensiasi, lapangan khusus kehidupan sebagai pelaksanaan perikemanusiaan yakni “Keadilan Sosial”. Sejalan dengan eksistensi manusia yang memanusia dengan menyatu ke dalam alam jasmani, manusia membudaya – kebudayaan ini mengolah alam yang salah satu diantaranya menghasilkan ekonomi. Keadilan sosial adalah perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam satu bidang, yakni ekonomi atau penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat hidup kita sepanjang hidup tergantung dari barang-barang materiil. (Sutrisno; 2006:77)

3. Persatuan sebagai esensi sila ketiga, hakekat dari satu. Manusia adalah manusia utuh yang seharusnya terdiri dari sesuatu yang baik di dalam dirinya, sehingga memiliki relasi harmonis dengan orang lain. Satu di dalam diri manusia merupakan satu yang tidak terlepas dengan satu individu lainnya, sehingga menghasilkan satu komunitas utuh dan menjadikan manusia yang sebenar-benarnya manusia, melalui kontemplasi refleksi dengan alam dan Tuhan.

Persatuan Indonesia adalah dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya

penarik ke arah kerjasama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagipula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan. (Notonagoro; 1988:205)

Inti sila ketiga dapat dirumuskan dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan Bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan, dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk-majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan. (Notonagoro; 1957:37) Bukti-bukti berupa bangunan misalnya candi Borobudur dan candi Prambanan, kedua candi ini adalah lambang agama Budha dan Hindu, keduanya terletak di daerah yang jaraknya tidak terlalu jauh, keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Keduanya merupakan bukti bahwa umat Hindu dan Budha dapat hidup rukun, saling tenggang satu dengan lainnya. (Sunoto; 1985:5)

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa. Drijarkara menyitir ucapan Thomas Aquinas dalam menjelaskan “Kebangsaan” (sila ketiga), yakni “Tanah-air itu prinsip dari suatu Adaku”. Menegara berarti penegaraan suatu bangsa sedemikian rupa sehingga kebangsaan merupakan prinsip dari penegaraan. Bangsa berarti kesatuan kulturil kesatuan ekonomis, kesatuan geografis, kesatuan sejarah, menegara berarti memperkembangkan kesemuanya itu. (Sutrisno; 2006:78)

4. Kerakyatan sebagai esensi sila keempat, hakekat dari rakyat. Manusia utuh ialah manusia yang mampu menjadikan individu di dalam dirinya bagian dari rakyat, mampu bergaul erat dengan rakyat, dan mampu memecahkan problema bersama secara musyawarah dan
-

mufakat. Manusia utuh ialah manusia yang mampu bertenggang rasa bersedia memberi dan mau menerima pendapat orang lain. Kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat, sebagai pelindung kekuasaan (demokrasi politik) dan pendukung kepentingan (demokrasi fungsional) dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal 'Negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat'. (Notonagoro; 1988:205)

Perihal kerakyatan, dapat dikatakan bahwa mengingat sejarah dunia dan keadaan jaman sekarang serta pula terdapatnya aliran-aliran di dalam masyarakat Indonesia, kerakyatan dapat bermacam-macam bentuk sifatnya. Sama halnya dengan yang telah dilakukan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila Kemanusiaan, perlu diambil inti prinsipnya, yakni kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atas dasar tritunggal 'Negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat.' (Notonagoro; 1957:37) Kerakyatan dalam sila keempat adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat, sebagai pendukung kekuasaan (demokrasi politik) dan pendukung kepentingan (demokrasi fungsional) dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal.

Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Dalam bahasa lain kerakyatan disebut demokrasi berasal dari kata Yunani demos berarti rakyat, dan kratos yang artinya berdaulat. (Sunoto; 1985:6) Bukti-bukti berupa bangunan di Bali (*Balai Agung* dan *Dewan Orang-orang Tua*), di Minangkabau (*Nagari*), dan di Jawa (*Balai Desa*) menyimbolkan bahwa kesemua tempat tersebut merupakan tempat untuk mengadakan musyawarah. (Sunoto; 1985:6)

Jika kita berbicara mengenai musyawarah, maka Soekarno-pun sudah mengungkapkannya pada saat berpidato di Istana Negara tentang Pancasila Dasar Filsafat Negara,

"Demokrasi bagi kita bukan sekedar alat teknis. Memang benar bahwa demokrasi adalah alat teknis untuk mencapai sesuatu hal, sebagaimana nasionalisme adalah suatu alat teknis, sebagaimana diktatur proletariaat adalah satu alat teknis. Demokrasi bagi kita sebenarnya bukan sekedar satu alat teknis, tetapi kita satu alam jiwa pemikiran dan perasaan

kita. Tetapi kita harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran kita itu di atas kepribadian kita sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur, yang sudah jelas tidak bisa dengan demokrasi secara ini.” (Sunoto; 1985:12)

Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan negara masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya sesuatu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara atas kepentingan Masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada orang lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

5. Keadilan sebagai esensi sila kelima, hakekat dari adil. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang mejadi haknya, dan berarti juga memberi kepada dirinya sendiri apa yang mejadi haknya. Karena sisi hak adalah wajib maka adil berarti berlaku serasi dalam hubungan antara hak dan wajib. Oleh karena itu, manusia uth seharusnya dapat berlaku adil artinya melaksanakan hak dan wajib yang serasi terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan hidupnya juga terhadap Tuhan. (Sunoto; 1985: 59-60)

Keadilan sosial ialah bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, kebebasan, dan kekuasaan perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak daripada manusia sebagai makhluk hidup dan oleh karena itu menerima apa yang menjadi hak-kebutuhannya, bukan karena hasil usahanya, akan tetapi hak-kebutuhan, di dalam arti yang mutlak daripada manusia. (Notonagoro; 1988:205)

Sila keadilan sosial adalah suatu prinsip, bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, disamping kesamaan politik. Didalam lapangan sosial dan ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat manusia

sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak daripada manusia sebagai individu, karena itu bebas hidup berarti berhak untuk hidup, dan berhak untuk hidup berarti menerima apa yang menjadi hak dan kebutuhannya, bukan karena hasil usahanya, akan tetapi hak-kebutuhan dalam arti yang mutlak daripada manusia. Hak untuk hidup, yang harus dilaksanakan, hanya tentu dapat dilaksanakan kalau dipenuhi kebutuhan yang perlu dilaksanakan untuk melangsungkan hidupnya, dan kebutuhan itu merupakan hak. (Notonagoro; 1957:37-38)

Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir batin. (Sunoto; 1985:7) Dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Seperti uraian yang diungkapkan oleh Presiden Universitas Prof. Dr. Sardjito pada Dies Natalis UGM ke-IV tanggal 19 Desember 1955;

“... Dengan singkat ialah, bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara dari negara Indonesia menjadi wadah bagi cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang pertama, seperti hak kemerdekaan bangsa, perikeadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sila perikemanusiaan), kesatuan bangsa, keseluruhan daerah (sila kebangsaan), kedaulatan rakyat (sila kerakyatan), dan kesejahteraan umum (sila keadilan sosial). Bagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan kepada pernyataan, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” (Notonagoro; 1957:86)

“... Pancasila adalah pensifatan dan bentuk baru yang sesuai dengan keadaan daripada ideologi bangsa Indonesia.” (Notonagoro; 1957:86)

Menurut Drijarkoro di dalam seminar Pancasila,

“... Dengan kesemuanya itu kita hanya hendak mengemukakan, bahwa Pancasila sudah lama merupakan Weltanschauung bagi kita Bangsa Indonesia, akan tetapi tanpa dirumuskan sebagai filsafat. Sebagai dalil-dalil filsafat Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aku manusia mengakui, bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (liebendes Miteinandersein). Jadi adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia, jika dipandang pada umumnya disebut: Perikemanusiaan.

Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelasan Perikemanusiaan dalam sektor ini disebut Keadilan Sosial.

Perikemanusiaan harus kulaksanakan juga dalam memasyarakat. Aku manusia niscaya masyarakat. Masyarakat berarti mengadakan kesatuan-karya. Agar supaya kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari Perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai Pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan Perikemanusiaan dalam sektor ini ialah pembentukan kesatuan karya, kita sebut Demokrasi. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil maupun dalam masyarakat besar.

Perikemanusiaan harus kulaksanakan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat-laun ditumbulkan oleh sejarah, keadaan, tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor.

Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkrit dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya, dan selanjutnya.

Ada bersama pada konkritnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Jadi: hidupku dalam kesatuan itu harus merupakan pelaksanaan dari

Perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, dimana aku pertama harus melaksanakan Perikemanusiaan disebut Kebangsaan.

Aku mengakui bahwa adaku itu ada bersama, serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Jadi aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang ada dengan terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tidak mungkin memberi keterangan dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya 'Ada yang Mutlak, Sang Maha Ada'. Sang Maha Ada itu bukanlah sesuatu, melainkan pribadi yang Maha Sempurna. Itulah Tuhan Yang Maha Esa.

Adaku berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha Cinta Kasih. Sang Maha Penyayang. Dalam pikiran ini aku menemukan dasar dari adaku: jadi: dasar dari semua perbuatanku; judul: dasar dari pelaksanaan Perikemanusiaan, Keadilan sosial, dan lain-lain.

Demikianlah Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat. Dengan hanya mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat. Pancasila barulah menjadi pendirian atau sikap hidup, jika orang berkata demikian: Hidupku akan merupakan pelaksanaan dari semua Sila itu. itulah kehendakku, itulah keputusanku, itulah tekadku!" (Sutrisno; 2006:76)

Jika kita mengutip tulisan Drijarkara tentang Pancasila, mengenai paparannya tentang Pancasila sebagai kategori tematis dan di lain pihak sebagai kategori operatif, bahwa Pancasila adalah inheren kepada eksistensi manusia sebagai manusia terlepas dari keadaan tertentu kepada konkretnya. Untuk menunjukkan akses manusia ke arah Pancasila, Drijarkara memulai dengan eksistensi manusia yang cara mengadanya ialah ada-bersama, bukan antara "Aku dan Engkau" melainkan ada bersama dalam "Aku-Engkau". Analoginya adalah permainan bulutangkis, yang strukturnya adalah permainan bersama, eksistensi manusia bahwa manusia tidak hanya meng-Aku melainkan dalam peng-Aku-an itu selalu memuat Engkau; manusia meng-Aku sekaligus meng-Kita. Keniscayaan eksistensial manusia sebagai ada-bersama tampak juga dalam fenomena bahasa. Di sini Drijarkara

menganalogikan dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga. Pemanusiaan manusia menghasilkan bahasa, manusia membahasa dan bukan berbahasa; hal ini menunjukkan struktur ada-bersama sebab “membahasa berarti ‘keluar’ dari diri sendiri dan ‘memasuki’ diri lain. (Sutrisno; 2006:76-77)

Maka, susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Kalau dilihat dari inti-isinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dan luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang dimukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara sila-sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat.

C. Landasan Aksiologis Pancasila

Pancasila menjadi ideologi khas dalam bernegara, karena hukum-hukum dan undang-undang negara Indonesia mengacu sesuai dengan keseluruhan dari Pancasila, sedangkan nilai dari Pancasila itu sendiri adalah;

1. Nilai kebenaran
2. Nilai kebaikan
3. Nilai keindahan
4. Nilai religius

PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila merupakan ideologi dan sistem filsafat yang tidak kosong tanpa makna, melainkan Pancasila adalah refleksi dari kehidupan berbangsa dan bernegara sejak sebelum kemerdekaan, dimulai pada saat bangsa ini hidup rukun antar agama Hindu-Budha, hingga kehidupan gotong-royong, dan rumusan lima sila inilah hasilnya. Pancasila adalah sebuah postulat, karena terdiri dari realita yang hidup di dalam diri bangsa Indonesia sendiri dengan unsur-unsurnya yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia, pancasila juga merupakan filsafat dan pandangan

hidup bangsa Indonesia, juga sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penulis melukiskan bagaimana cerdasnya para pejuang bangsa ini dalam merumuskan Pancasila, sehingga dapat bertahan lama serta teruji oleh zaman. Pancasila sangatlah penting bagi negara ini, dan dampak positifnya adalah negara kita tidak mudah terpecah-belah hanya karena perbedaan suku, bahasa, dan sosial. Pancasila adalah pusat nilai yang dapat menjadikan ukuran baik-buruk, indah-tidak indah, benar-salah terhadap kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan di Indonesia.

Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran, dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universil, meliputi seluruh alam kemanusiaan. Pancasila adalah dasar filsafat negara, dan Pancasila memberi sumber nilai dan orientasi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia dalam terminologi Demokrasi Pancasila. Ini adalah demokrasi kebangsaan Indonesia yang merupakan aliran langsung sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia, maka perlunya ideal keseimbangan pada aplikasi masing-masing sila Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena sila pertama merupakan fondasi kuat untuk mengikat keempat sila lainnya, juga setiap individu bangsa Indonesia memiliki keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa dan menciptakan segala semesta.

SARAN

Harapan dari kepenulisan makalah ini adalah agar bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam pembahasan Pancasila, serta filsafatnya. Masukan dari kawan-kawan, dosen pembimbing, dan senior-senior yang lainnya demi kemajuan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Edwin, Fery, dkk, *Prof. Notonagoro dan Pancasila: Analisis Tekstual dan Kontekstual*, Universitas Gadjah Mada, tahun 2006.

Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Penerbit Paradigma Jogjakarta, tahun 2009.

Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, tahun 2011.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, tahun 1995.

Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi Offset Jogjakarta, tahun 2006.

Sutrisno, Slamet, *Pancasila, Kebudayaan dan Kebangsaan*, Penerbit Liberty Jogjakarta, tahun 1988.

Sunoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Penerbit Andi Offset Jogjakarta, tahun 1985.

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila; Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, PT. Hanindata, tahun 1985.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafath Negara*, Bina Aksara, tahun 1988.

Notonagoro, *Pancasila dasar negara, UGM, dan jati diri bangsa*, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, tahun 1957.
